

Di beberapa tempat didaerah Temiang dan didaerah Su -
matra Timur istilah penghulu untuk sebutan kepala desa
masih terus dipakai ghingga sekarang, sesudah penduduk
didaerah istimewa Aceh memeluk agama islam, maka mulai
lah terbentuk lembaga meunasah yang dikepalai oleh -
Teungku Meunasah yang fungsinya sebagai pembantu kepa-
la desa terutama dalam bidang agama.

Di beberapa tempat beberapa pengusaha kecil memerintah
beberapa desa disekitarnya dikepalai oleh Meurah-meurah
wilayah yang serupa ini kemudian bertumbuh menjadi -
Nanggroe yang dikepalai oleh Ulle Balang.

Ibn Batutah yang tiba di Sumatra di zaman pemerin
tahan raja ini tahun 1345 M telah mensifatkan dengan -
jelas dan terang bagaimana bentuk pelabuhannya, Bandar
nya, ulama-ulamanya dan bagaimana kebesaran raja ini -
dan kuatnya berpegang dengan agama dan kasihnya kepada
ilmu dan ulama.¹⁰

Kepala pemerintahan kerajaan adalah Sultan atau Raja -
yang berkedudukan dikota pusat kerajaan, bagaimana ben
tuk susunan dari struktur birokrasi pemerintahan pusat
hanya sedikit yang dapat diketahui.¹¹

10. Prof. A. Hasjmy. Sejarah masuk dan berkem -
bangnya islam di Indonesia. PT. Alma'arif, 1981 Hal.205.

11. Sejarah daerah propinsi daerah Istimewa -
Aceh, Opcit H al. 49 - 50.

Dari hikayat raja-raja Pasai A. H. Hil, menyebutkan beberapa pejabat kerajaan dan pejabat militer dari - masa pemerintahan Sultan Malikus Saleh hingga Sultan sultan berikutnya.

Sebutan pejabat-pejabat ini diuraikan berdasarkan perbandingan dengan sejarah melayu adapun Pejabat-pejabat kerajaan tersebut adalah Menteri, Ulee Balang, Sida-sida Embuai, Pendita dan beberapa pembesar istana lainnya.

Adapun nama-nama pejabat militer dalam kerajaan Samudra Pasai ialah Panglima dan kemudian dibawahnya pahlawan dan punggawa, sedang kerajaan disebut Las- kar.

Untuk membantu para ratu dan putri-putri raja ter- dapat jabatan-jabatan seperti inang, dayang-dayang, pengasuh dan beti-beti.

Para pengusaha atau pemegang pemerintahan ter- tinggi bergelar Tun Beraim Bapa untuk raja yang me- megang pemerintahan sering juga diberi gelar Syah - Alam dan kadang-kadang ditambah pula gelar Zlluhifil Alam atau Daulat Dirgahayu adapula gelar-gelar yang

dicatat oleh Hill merupakan pengarah gelar-gelar di Jawa seperti : Penggawa, Angebai, Aria, Bebekol, per tinggi dan sebagainya.

Pada bagian lain dari hikayat itu dijumpai pula gelar tertinggi pejabat kerajaan yaitu Perdana Menteri contohnya pada masa pemerintahan Malikul Mahmud yang menjadi perdana menteri ialah Sayid Chiatuddin yang pada mulanya bergelar Tun Bri Kaya (gelar orang besar dalam negeri) dan pada pemerintahan Sultan Malikul Mansur yang menjadi perdana menteri adalah Sayid Amayuddin yang semula bernama Tun Baba Kaya. Jabatan yang berhubungan dengan pelayanan, perdagangan dan pertahanan laut dikenal pula pada masa itu dengan istilah Laksamana.

Diproklamirkan berdirinya kerajaan Aceh Darussalam merupakan sebagai hasil peleburan kerajaan Islam Aceh sebelah Barat dengan kerajaan Islam Samudra Pasai disebelah Timur.

Dan putra Sultan Syamsu Syah, diangkat menjadi rajanya dengan gelar Sultan Alaidin Ali Mughaiyatsyah, Kota Banda Aceh disempurnakan namanya sehingga menjadi " BANDA ACEH DARUSSALAM ".

disamping didapatnya ganongan dan pintho khop.

Drs. H. Ismuha bekas Rektör Institut Agama islam negeri Ar Raniry, menulis mengenai pengadilan agama - (Mahkamah Syariah) di Aceh dahulu beliau menyatakan pada zaman jayanya kerajaan Aceh, kekuasaan peradilan dipegang oleh Qadhi Malikul Adil, ini dapat disamakan dengan ketua Mahkamah Agung (MA), di masing-masing daerah Ulebalang terdapat Qadhi Ulebalang yang memutuskan perkara-perkara didalam daerahnya.

Pihak yang menaruh keberatan atas keputusan Qadhi Ulebalang, dapat mengajukan bandingan-bandingan kepada Qadhi Malikul Adil.

Keputusan Qadhi Malikul Adil merupakan keputusan terakhir dan dengan sendirinya kuat dan harus dijalankan.¹²

12. Prof. DR. Ismail Suny SH. M. CL, Bunga Rampai tentang Aceh. Pen. Bharatara Karya Aksara. Jakarta. 1980 Hal. 7.